

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

**SORAYA DWI ESFANDIARI**

**NIM. 10500109061**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**SORAYA DWI ESFANDIARI**

**NIM. 10500109061**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

## **ABSTRAK**

Nama penyusun : Soraya Dwi Esfandiari  
Nim : 10500109061  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar”

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BPN Makassar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah.

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Badan Pertanahan Nasional Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung, baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa data lainya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selajutnya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas, data yuridis dan data fisik. Setelah permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa, diteliti dan jika sudah dianggap lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi. Selanjutnya berkas permohonan diperiksa dan apabila semua syarat terpenuhi maka disampaikan kepada penggugat bahwa surat keputusan atau sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dengan demikian, maka pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sedangkan Faktor-faktor yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah yaitu: faktor kepatuhan Hukum dari Badan/ Pejabat Hukum, faktor berubahnya keadaan (sosial, budaya, alam), faktor kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan, faktor pihak yang memenagkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Pro Aktif megajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan faktor banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara SORAYA DWI ESFANDIARI NIM: 10500109061 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. Marilang, S.H., M.H**  
NIP: 19610404 199303 1 005

**Zulhas'ari Mustafa, S.Ag.,M.Ag**  
NIP: 19681218 199803 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2013

Penyusun,

**Soraya Dwi Esfandiari**

NIM: 10500109061

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar** ” yang disusun oleh saudari SORAYA DWI ESFANDIARI, NIM: 10500109061, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2013

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir,S.H.,M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi,S.H.,M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ahkam Jayadi,S.H.,M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang,S.H.,M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Zulhas'ari Mustafa,S.Ag.,M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.**  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehinggalah penulis selalu bersemangat dan kuat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*. Tak lupa pula Shalawat dan salam akan selalu tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyajiannya, namun sebagai manusia biasa, bahwa penyusunan skripsi ini tak luput dari kekurangan. Untuk itu mohon kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, bimbingan dan pengarahan, baik secara spiritual maupun moril. Oleh karenanya, atas bantuan yang telah diberikan, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Kedua Orangtua yang sangat saya sayangi dan hormati, Bapak H. Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si dan Ibu. Hj. Hasma Julia, SE. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan memberikan segala yang saya butuhkan, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna kelak.
2. Yth. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah, Pembantu Dekan, bapak dan ibu dosen jurusan Ilmu Hukum, dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak DR. Marilang, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-masukan yang membangun terkait judul yang diangkat. Dan Yth. Bapak Zulhas'ari Mustafa, S.Ag.,M.Ag juga sebagai Dosen Syariah Dan Hukum sekaligus selaku

pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait metode penulisan dalam skripsi ini.

4. Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, S.H.,M.H., serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait yang berkaitan pengurusan akademik sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penulisan karya ilmiah ini.
5. Yth. Hakim-hakim serta staf Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang selalu menyempatkan waktu selama penelitian berlangsung.
6. Yth. Bapak Nur Fajar, selaku Kepala Seksi Sengketa dan Konfik Pertanahan di BPN kota Makassar yang telah menyempatkan waktunya disela-sela jadwalnya yang padat.
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan kepada saya.
8. Teman-teman terkasih Ilmu Hukum 2009 “Sang Motivator Handal”, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman seperjuanganku di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, terima kasih atas dukungannya.
10. Temanku Muhammad Mahathir, S.H. yang telah menjadi pembimbing III bagi saya, terima kasih banyak atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang selama ini membantu dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin menjadi sempurna karena keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Namun penulis berharap semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, dan dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangsi pemikiran terhadap lembaga pendidikan yang terkait.

Amin yaa Robbal Aalamin . . .

*Wassalamu alaikum Wr.Wb.*

Penulis

**Soraya Dwi Esfandiari**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
E. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian-pengertian .....	10
1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	10
2. Wewenang Badan Pertanahan Nasioanal .....	12
B. Jenis-jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara .....	15
C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.....	22

D. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Ingkrah.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu penelitian .....	32
C. Jenis Dan Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Ingkrah Oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar ....	35
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Ingkrah .....	42
<b>BAB V P E N U T U P.....</b>	<b>61</b>
C. Kesimpulan.....	61
D. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Semakin tingginya kepadatan penduduk semakin besar pula serta kebutuhan akan tanah meningkat sedangkan luas tanah tetap dan bahkan berkurang. Keadaan demikian dapat menimbulkan pertentangan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memiliki tanah tanpa didasari oleh bukti hak yang kuat. Penguasaan tanah oleh anggota masyarakat umumnya diperoleh dengan cara membuka melalui sistem lading berpindah dan selanjutnya dikuasai oleh masyarakat sampai sekarang, melalui proses pewarisan dan peralihan hak yang pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis. Untuk mengetahui proses beralihnya hak atas tanah sulit dibuktikan dengan alat bukti yang kuat sehingga timbul ketidakpastian mengenai siapa pemiliknya maupun batas-batas tanahnya.

Dalam hukum Islam, hak milik atas tanah sangat dilindungi. Oleh karena itu, mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dalam berbagai bentuk dilarang dalam Islam.

Ibnu Umar r.a. menerangkan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَغْيًا حَقَّهُ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengambil tanah milik orang walau sedikit dengan cara yang tidak benar, niscaya pada hari kiamat Allah akan

membenamkannya kedalam tujuh perut bumi”. (H. R. Ahmad, Al-Bukhary, Al-Muntaqa 11:407).<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintahan tidak dapat lagi ditampung oleh peradilan umum yang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Peradilan ini dalam radisi *rechtstaat* disebut dengan peradilan administrasi. Begitu pentingnya peradilan administrasi ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Tata Tata Usaha Negara yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah banyak kasus sertifikat yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan cacat administrasi adalah pembatalan keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diketahui ada kesalahan substansial/ admiministrasi, sehingga bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Kesalahan yang bersifat administrasi berarti suatu kesalahan yang bersifat pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat haknya. Dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

---

<sup>1</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hais-hadis Hukum* (Cet. 3; Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2001), h. 225.

Usaha Negara adalah aspek substansi seperti subjek, objek, isi dan tujuannya. Lingkup substansial berhubungan dengan isi dan tujuan sebagaimana isi dan tujuan peraturan dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lain ataupun peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut.

Soehino menjelaskan:

“isi serta tujuan ketetapan administrasi harus sesuai dan isi serta tujuan peraturan yang memuat aturan-aturan hukum inabstrakto dan unpersonal yang menjadi dasar hukum, serta memberi wewenang khusus kepada alat perlengkapan administrasi negara untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berupa pembentukan aturan hukum inkonkrito terhadap hal-hal atau keadaan konkret.”<sup>2</sup>

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa:

“salah satu aspek sahnya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara adalah aspek substansif, artinya obyek keputusan tidak ada cacat administrasi”.<sup>3</sup>

Jika ternyata terbukti adanya cacat administrasi maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan adanya cacat administrasi, disini objek yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara adalah sertifikat hak atas tanah, dan yang menjadi subjek adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai badan hukum perdata yang menerbitkan

---

<sup>2</sup>Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara* (Jogjakarta : Liberty, 2000), h. 119.

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Jogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), h.83.

sertifikat atas tanah. Dengan dasar itu, pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi domain Badan Pertanahan Nasional atas pembatalan hak atas tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka haknya demi hukum hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Apabila Putusan Pengadilan memerintahkan penghapusan hak atas tanah, maka pencatatan hapusnya hak atas tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Akan tetapi dalam realitanya banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya berisi tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dianggap cacat administrasi tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal ini disebabkan karena UU No. 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci tahapan upaya

eksekusi secara paksa yang bisa dilakukan atas keputusan PTUN serta tidak adanya kejelasan prosedur dalam UU No. 9 Tahun 2004.

Dalam Skripsi ini, penulis akan mengangkat salah satu kasus sengketa pertanahan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 31/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, disini Putusan Pengadilan tentang pembatalan sertifikat tanah belum dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Makassar.

Oleh karena itu, saya bermaksud mengangkat fenomena ini dengan judul ***“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar”***, dimana akan meneliti profesionalisme dan konsistensi aparat pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat menimbulkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan draf ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah ingkrah oleh BPN
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BPN Makassar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah.

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan terhadap Ilmu Hukum, serta khususnya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam melaksanakan putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

### ***D. Sistematika Penulisan***

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :



**BAB I PENDAHULUAN** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan dan definisi operasional.

**BAB II KAJIAN TEORITIS** Dalam bab ini berisi tentang beberapa pengertian mengenai Putusan PTUN, dan wewenang BPN, juga jenis-jenis putusan PTUN, putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah ingkrah.

**BAB III METODE PENELITIAN** Dalam bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Dalam bab ini penulis akan dibahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar. Kedua, faktor apakah yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**BAB IV PENUTUP** Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

### ***E. Defenisi Operasional***

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai variabel:

“*Pelaksanaan*” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)<sup>4</sup>.

“*Putusan*” Menurut Kamus Hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.<sup>5</sup>

“*Pengadilan Tata Usaha Negara*” menurut Kamus Hukum adalah Badan Peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama perkara-perkara tata usaha Negara dalam rangka melindungi anggota masyarakat dari tindakan atau kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau aparatur Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 627.

<sup>5</sup>Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P.SH, *Kamus Hukum* (Surabaya : Reality Publisher, 2009), h. 517.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 501.

*“Badan Pertanahan Nasional”* Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 adalah Lembaga pemerintah non departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.<sup>7</sup>

Jadi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka definisi operasionalnya adalah bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>7</sup>Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Peraturan Bidang Pendaftaran Tanah* (Jakarta, 2004), h. 61.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### *A. Pengertian-pengertian*

##### **1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu Penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif dan negatif.<sup>1</sup>

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan Pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Pasal 108 UU Nomor 5 tahun 1986*).

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa:

- a. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada waktu sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut; atau

---

<sup>1</sup>Zevan Institute, “*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*,” *Zevan Institute Blog*. <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com>. (Diakses 16 Januari 2013).

- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu eksepsi yang diterima oleh majelis Hakim; atau
- c. Gugatan dinyatakan ditolak, setelah diperiksa ternyata tidak terbukti; atau
- d. Gugatan dinyatakan dikabulkan;<sup>2</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat Comdemnatoir, berisi penghukuman kepada tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu kewajiban yang berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
- d. Membayar ganti rugi;
- e. Memberikan rehabilitasi.<sup>3</sup>

Berhubung tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas adalah pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sangat tergantung kepada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para Pejabat itu sendiri.

---

<sup>2</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 80.

<sup>3</sup>Paulus JJ. Sipayung, *Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam PTUN* (Jakarta : Departemen Dalam Negeri), h. 168.

## 2. Wewenang Badan Pertanahan Nasional

Dasar Kewenangan Badan Pertanahan Nasional adalah : <sup>4</sup>

Dalam mengemban tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Instansi Vertikal tetap melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang perlu mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu.

Dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan TAP MPR tersebut diatas telah dikeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Adapun kebijakan tersebut adalah dalam rangka Percepatan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi :

Penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di Bidang Pertanahan.

---

<sup>4</sup>Rita Esti Sri, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada era otonomi Daerah (perspektif politik hukum pertanahan)," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan*. Phhttp://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/view/88/70 ( Diakses 11 Januari 2013)

- a. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:
  - 1) penyusunan basis data tanah-tanah asset negara/ pemerintah daerah diseluruh Indonesia;
  - 2) penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan ecommerce dan epayment;
  - 3) pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah;
  - 4) pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui system informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.
- b. Sebagian kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
  - 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    - a) pemberian izin;
    - b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
    - c) penyelesaian sengketa tanah garapan;
    - d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

- e) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  - f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  - g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
  - h) pemberian izin membuka tanah;
  - i) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tata kerjanya ini telah berjalan sebagai-mana mestinya dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Gubernur untuk tingkat propinsi sedangkan oleh Bupati/ Walikota untuk Kabupaten/ Kota. Selama ini urusan pertanahan masih dikuasai Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi vertical, sering terjadi perbedaan fungsi lahan. Perbedaan terjadi karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi izin penggunaan lahan yang berbeda dengan rencana tata ruang kota. Akibatnya masyarakat dan investor sering mengalami kerugian karena lahan yang mereka miliki tidak dapat digunakan/ berfungsi untuk aktifitas tertentu mengingat adanya perbedaan dengan tata ruang kota.

Pemerintah pusat harus segera menyerahkan urusan pertanahan kepada daerah otonom. Penyerahan itu penting agar semua kota dan kabupaten mudah mengatur lokasi lahan guna perencanaan tata ruang.



Dualisme wewenang itu sudah saatnya diakhiri dengan menyerahkannya ke Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Untuk memudahkan penyerahan urusan pertanahan sebaiknya diajukan judicial review atas peraturan presiden mengenai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Judicial review itu untuk memudahkan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan pelaksanaan itu harus dipertegas kewenangannya Pemerintah Daerah.

### ***B. Jenis-jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara***

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga dikenal adanya<sup>5</sup>:

1. Putusan yang bukan putusan akhir;
2. Putusan akhir.

Adanya putusan yang disebut putusan yang bukan putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 113 ayat (1):

“Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang”.

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 187

b. Pasal 124:

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir”.

Dengan adanya putusan yang bukan putusan akhir, maka sudah tentu dikenal pula adanya putusan akhir, bahkan pada perumusan Pasal 124 disebut: “.....bersama-sama dengan putusan akhir”.

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai.

Tujuan dari dijatuhkannya putusan yang bukan akhir adalah untuk memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di sidang Pengadilan.

Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir, contohnya adalah:

- a.1) putusan hakim yang memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk datang menghadap sendiri ke pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa (Pasal 58);
- 2) putusan hakim ketua sidang yang mengangkat seorang ahli-ahli bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau saksi sebagai juru bahasa (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1));
- b.1) putusan Hakim Ketua Sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penggugat atau Tergugat atau karena jabatannya (Pasal 103 ayat (1));

2) putusan hakim mengenai beban pembuktian (Pasal 107).

Dalam perpustakaan Hukum Acara Perdata, contoh yang bukan putusan akhir pada butir a dinamakan *putusan praeparatoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan dan mengatur mengenai pemeriksaan perkara.

Putusan hakim ini tidak sampai akan mempengaruhi putusan terhadap pokok perkara. Menurut M. Yahya Harahap, pada saat sekarang putusan *praeparatoir* ini tidak pernah lagi dipraktikkan.

Adapun contoh putusan yang bukan putusan akhir pada butir b dinamakan *putusan interlocutoir*, yaitu putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya memerintahkan pembuktian.

Putusan hakim ini dapat mempengaruhi putusan terhadap pokok perkara. Menurut M. Yahya Harahap, pada saat sekarang putusan *interlocutoir* sudah jarang dipraktikkan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, jika hakim memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk membuktikan sesuatu hal, perintah hakim seperti ini sebetulnya tidak perlu disusun secara surat keputusan, melainkan cukup diucapkan oleh hakim secara lisan saja.

Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 baru berlaku secara efektif sejak tanggal 14 Januari 1991, maka terlalu dini dan memerlukan penelitian untuk menentukan apakah dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, penerapan putusan yang bukan putusan akhir yang dalam perpustakaan Hukum Acara Perdata dinamakan putusan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir*, praktiknya adalah sama dengan apa

yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap.

Tetapi yang jelas, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum dari hakim untuk menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dalam kepustakaan Hukum Acara Perdata dinamakan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir*.

Oleh karena itu pula, menurut penulis tidak benar jika Martiman Prodjohamidjojo sampai mengemukakan pendapat bahwa dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya putusan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir*, apalagi yang dipergunakan sebagai alasan adalah karena gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1). Apa sebab sampai gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, karena dalam Hukum Tata Usaha Negara dikenal adanya *asas praduga rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio in stae causa*) terhadap semua tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya.

Dengan adanya asas ini, maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya putusan yang bukan putusan akhir yang dalam kepustakaan Hukum Acara Perdata dinamakan *putusan provisionil*, yaitu putusan hakim (karena ada hubungannya dengan pokok perkara) yang menetapkan untuk melakukan tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara, misalnya dalam

perkara perceraian, putusan yang memerintahkan kepada suami untuk tetap membayar nafkah untuk istrinya selama perkara sidang diperiksa.

Apa sebab sampai Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya putusan provisionil, karena Pasal 115 menentukan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sedang putusan provisionil adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a.1) putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolute;
- 2) putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh tergugat (Pasal 77 ayat (1));
- b. putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat (Pasal 77 ayat (2));

Jika tergugat keberatan terhadap ketiga putusan hakim yang dimaksud, maka dengan sendirinya langsung dapat diajukan permohonan pemeriksaan banding, yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

Dengan demikian, meskipun ketiga putusan hakim yang dimaksud adalah putusan yang bukan putusan akhir, tetapi ketiga putusan tersebut dianggap sebagai

putusan akhir, sama seperti yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.<sup>6</sup>

## 2. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (7), dapat diketahui bahwa putusan akhir dapat berupa:

### a. Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan baatal atau sah. Dengan demikian, putusan yang berupa gugatan ditolak baru dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

### b. Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan senketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha yang dinyatakan batal atau tidask sah. Oleh pasal 97 ayat (8) ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam pasal 97 ayat (9) yang berupa:

---

<sup>6</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 124.

- 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau
- 2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

c. Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan yang tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dikemukakan pada putusan tersebut sebenarnya bersifat deklaratif, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat.<sup>7</sup>

d. Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

---

<sup>7</sup>Indraharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 134.

***C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap.***

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum (Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986).<sup>8</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan kata “Pengadilan” dalam perumusan Pasal 115 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, yang dapat dieksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap saja, yaitu jika:

1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ditingkat banding;
2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.

Adapun mengenai putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, rupanya oleh pembuat Undang-Undang tidak perlu diatur, karena dengan sendirinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat

---

<sup>8</sup>Rozali Abdullah, *op. cit.*, h. 81.



dilaksanakan seperti terhadap putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup>

***D. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Ingkrah***

Diktum putusan Pengadilan yang perlu dilaksanakan lebih lanjut adalah diktum gugatan dikabulkan (pasal 97 ayat (7) huruf b), yaitu yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11).

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 dapat diketahui bahwa ada 2 mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu disamping menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, juga menetapkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;

---

<sup>9</sup>R. Wiyono, *op. cit.*, h. 232

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 233-234.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang disamping menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, juga menetapkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang baru;
- b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf c yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini, dari Pasal 116 ayat (2) dapat diketahui bahwa dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan dikirim oleh panitera, Tergugat harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.

Jika Tergugat tidak atau belum mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dsari Pengadilan, misalnya adanya surat peringatan dan sebagainya.

Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi ukuran dimulainya tenggang waktu 4 (empat) bulan tersebut adalah 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan dikirim oleh panitera dan bukan setelah Putusan Pengadilan yang dikirim oleh panitera

diterima oleh tergugat. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan ini diatur sebagai berikut: Setelah 3 (tiga) bulan sejak Tergugat menerima salinan putusan Pengadilan dan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama agar memerintahkan kepada Tergugat melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh penjelasan Pasal 116 ayat (3) disebutkan bahwa tenggang waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak bersifat mengikat.

Jika Ketua Pengadilan telah memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, Pasal 116 ayat (4) sesudah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 menentukan bahwa terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Jadi, terhadap tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Pembayaran sejumlah uang paksa

Dalam pasal 116 ayat (4) sesudah diadakan perubahan dengan Undsang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam Pasal 116 ayat (4) adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena

jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan dari Penggugat.

Dari penjelasan Pasal 116 ayat (4) tersebut dapat diketahui bahwa agar Putusan Pengadilan dapat dieksekusi dengan uang paksa, maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut.

*1) Pembebanan uang paksa harus dicantumkan dalam Amar Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan.*

Jika sampai Putusan Pengadilan tidak sampai mencantumkan adanya uang paksa, sedang Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, maka jalan keluarnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, tegasnya telah tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c.

*2) Uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya*

Dengan demikian meskipun didalam gugatannya penggugat tidak mencantumkan adanya uang paksa yang harus dibebankan kepada tergugat, dalam amar putusannya dapat saja hakim mencantumkan adanya uang paksa tersebut.

*3) Uang paksa baru dapat dilaksanakan pembebanannya kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, jika putusan*

*Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

b. Sanksi Administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Sanksi administratif tidak hanya sanksi yang berupa hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 saja, tetapi dapat berupa sanksi yang lain, misalnya alih tugas jabatan yang semula jabatannya adalah pimpinan, kemudian dialihkan menjadi staf. Selain dikenakan sanksi berupa pembebanan uang paksa dan/ atau sanksi administratif, selanjutnya Pasal 116 ayat (5) menentukan bahwa Tergugat tersebut diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c.

Sedangkan mekanisme Pelaksanaan Putusan PTUN yang sudah ingkrah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembatalan Hak Atas Tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka haknya demi hukum hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Pencatatan hapusnya hak dilakukan dengan mencoret dengan tinta hitam dalam buku tanah dan sertifikat (apabila sertifikatnya diserahkan) serta mencoret nomor hak yang bersangkutan, selanjutnya dalam halaman perubahan yang telah disediakan dituliskan “hak atas tanah hapus berdasarkan keputusan pembatalan hak nomor....tanggal...., serta dicoret dalam daftar nama, surat ukur dan petanya serta nomor hak yang telah hapus”. Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>11</sup>

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, maka Kepala Kantor Pertanahan mencatat perubahan data tersebut pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya, setelah ada pemberitahuan resmi dari Pengadilan atau ada permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan lampiran salinan resmi putusan/ penetapan pengadilan dimaksud.

---

<sup>11</sup>Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2010), h. 321.

Apabila Putusan Pengadilan memerintahkan penghapusan hak atas tanah, maka pencatatan hapusnya hak atas tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam memori penjelasan Pasal ini diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Agama. Dijelaskan juga bahwa Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Maksudnya, apabila Putusan Pengadilan dalam amarnya menyatakan bahwa sesuatu hak atas tanah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (peradilan umum) atau menyatakan batal sertifikat hak atas tanah nomor tertentu (peradilan tata usaha Negara), maka dengan putusan tersebut tidak secara otomatis batalnya hak atas tanah dimaksud, tetapi masih diperlukan tindakan administratif oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah dimaksud, selanjutnya diperintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk mencatatnya dalam buku tanah, sertifikat dan daftar umum lainnya.

Berdasarkan Pasal 125-128 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan

atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pencatatan tersebut dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- 1) Salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;
- 2) Sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah susun yang bersangkutan;
- 3) Identitas Pemohon.

Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek gugatan di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan. Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.

Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah. Catatan (blokir) mengenai perintah status quo



tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam rangka penyidikan atas penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya serta kalau mungkin, pada sertifikatnya, berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. catatan mengenai penyitaan tersebut dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/ diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan. Pencatatan lain yang dimaksud dalam Pasal 125, 126, dan 127 dalam rangka gugatan di depan Pengadilan dan penuntutan perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan apabila permintaan untuk itu disampaikan melalui dan disetujui oleh Menteri.

Perlindungan berkomentar bahwa dilaksanakannya perubahan data pendaftaran tanah karena putusan atau penetapan pengadilan tersebut karena segala masalah yang menyangkut pertanahan, maka Instansi Badan Pertanahan Nasional wajib tunduk kepada keputusan pengadilan tentang hak dan kewajiban maupun kebenaran dari suatu hak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 358-361.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian gabungan antara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (*Sosiolegal*). Secara yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Secara yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

#### ***B. Lokasi dan Waktu penelitian***

Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Makassar, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar. Pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut menyimpan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi penulisan ini Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 30 Februari 2013.

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian yaitu Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kepala Sub Sengeketa dan konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dianggap mengetahui serta menguasai permasalahan yang akan di bahas.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menghimpun data-data, serta dari hasil menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok kajian ini.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menyaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, pengumpulan data melalui observasi dikarenakan dengan pengamatan secara langsung kita dapat melihat dan memahami kejadian yang sebenarnya di lapangan.
2. Wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihakpihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Badan Pertanahan Nasional Makassar.

3. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengambil data serta mengamati dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional Makassar.

#### ***E. Teknik Analisis Data***

Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui pendekatan normatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk melengkapi hasil penelitian penulisan skripsi hukum ini, maka dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berhubungan dengan Judul Skripsi Yang Diangkat adalah *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar*. Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

#### ***A. Mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar***

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara artinya telah maju selangkah lagi di bidang pelayanan masyarakat, yaitu lebih memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dari Pejabat atau Badan TUN, termasuk Pejabat Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana tercermin dalam tujuan peradilan administrasi itu sendiri yaitu untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak untuk rakyat semata-mata, melainkan juga bagi administrasi Negara dalam hal adanya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi Negara akan

terjadi ketertiban, ketentraman dari keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa dalam kaitan Negara hukum berdasarkan Pancasila

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya

Sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah banyak kasus sertifikat yang telah dibatalkan oleh PTUN.

Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan cacat administrasi adalah pembatalan keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diketahui ada kesalahan substansial/ administrasi, sehingga bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Kesalahan yang bersifat administrasi berarti suatu kesalahan yang bersifat pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat haknya. Dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnyanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek substansi seperti subjek, objek, isi dan tujuannya. Lingkup substansial berhubungan dengan isi dan tujuan

sebagaimana isi dan tujuan peraturan dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lain ataupun peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut.

Menurut wawancara dengan hakim Sutyono dikatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sikap yang diambil oleh majelis hakim yang dituangkan dalam bentuk putusan mengenai sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa antara orang/ badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara”.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Sutyono mengemukakan bahwa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

#### Pasal 116

- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

---

<sup>1</sup>Sutyono, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar. 5 Februari 2013.

- 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakan oleh narasumber bahwa Kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap para pihak, khususnya pihak tergugat yang oleh putusan Pengadilan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Sama halnya seperti yang dikatakan Sutiyono sebelumnya, menurut Simbar Kristianto mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan pasal 116 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>2</sup>

Hakim Simbar Kristianto lebih lanjut mengatakan bahwa kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kekuatannya sama dengan putusan Pengadilan lainnya, yang merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh semua pihak apalagi Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat Orgaomnus atau mengikat semua pihak.

---

<sup>2</sup>Simbar Kristianto, Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 20 Februari 2013.



Pada dasarnya menurut narasumber, eksekusi di PTUN menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak BPN yang diwakili oleh Nur Fajar mengatakan bahwa:

“Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>3</sup>

Menurut narasumber Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yakni terlebih dahulu pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, hal ini sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :

1. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 memuat:
  1. Keterangan mengenai Pemohon:
    1. Apabila perseorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya;
    2. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Keterangan mengenai tanahnya:
    1. Nomor/ jenis hak atas tanah;
    2. Letak tanah, batas-batas dan luas tanah.

---

<sup>3</sup>Nur Fajar. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan di BPN kota Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 11 Februari 2013.

3. Alasan permohonan pembatalan dan bukti-bukti lain yang mendukung.  
Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam

Peraturan Menteri Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, harus dilampiri dengan:

- a. Foto Copy identitas;
- b. Foto Copy surat keputusan/sertifikat;
- c. Foto copy akta pendirian badan hukum;
- d. Foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan putusan akhir;
- e. Berita acara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana;
- f. Atau surat - surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.

Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan, selanjutnya pembatalan sertifikat hak atas tanah melalui beberapa proses berdasarkan pasal 60 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011:

- (1) Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu:
  - a. penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;
  - b. penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;
  - c. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;
  - d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi;
  - e. Gelar Istimewa dalam hal sangat diperlukan;
  - f. penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan
  - g. pembuatan keputusan penyelesaian kasus.
- (2) Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI, dan memberitahukan kepada pemohon serta pihak lain yang terkait.

Jadi disini penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan keluarnya putusan Putusan Tata Usaha Negara tidak secara otomatis batalnya hak atas tanah dimaksud, tetapi masih diperlukan tindakan administratif oleh Pejabat Tata Usaha

Negara untuk menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah dimaksud. Tindakan administratif dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu:

1. Pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, hal ini sesuai dengan pasal 126 Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
2. Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selajutnya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas, data yuridis dan data fisik pemohon berdasarkan pasal 60 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 .
3. Setelah permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa, diteliti dan jika sudah dianggap lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi. Selanjutnya berkas permohonan diperiksa dan apabila semua syarat terpenuhi maka disampaikan kepada penggugat bahwa surat keputusan atau sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dengan demikian, maka pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.

***B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah Ingkrah***

Dewasa ini konflik atau sengketa tanah menjadi tidak sederhana bahkan kompleksitas persoalan tanah dengan kompleksitasnya kehidupan Negara dalam lingkungan yang kecil. Sengketa tanah yang semula dapat diselesaikan oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan melalui pranata adat, saat ini telah melibatkan beberapa komponen yang memiliki beberapa kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan antara pemilik tanah yang bersangkutan, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan pemerintah, sehingga penyelesaian sengketa tanah harus bergeser dari semula melalui lembaga pranata adat, hal ini dilakukan karena tidak ditemukan model penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, akhirnya penyelesaian sengketa tersebut melibatkan lembaga atau institusi Negara yaitu Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan, sengketa pertanahan dari tahun ke tahun di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat pada table 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Kasus Sertifikat Tanah yang masuk**  
**di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**  
**dirinci menurut tahun 2008-2012**

No	Tahun	Diterima	Diputus	Total
1	2008	48	47	95
2	2009	58	38	96
3	2010	50	50	100
4	2011	53	39	92
5	2012	65	52	117
<b>Total</b>		<b>274</b>	<b>226</b>	<b>500</b>

*Sumber Data: PTUN Makassar, 2013*

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kasus sertifikat hak atas tanah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sertifikat tanah dari tahun 2008 – 2012 dapat dilihat di table 2 dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**  
**tentang Sertifikat Tanah dirinci menurut tahun 2008 – 2012**

No	Tahun	Yang Membatalkan Sertifikat	Yang Mengukuhkan Sertifikat	Total
1	2008	19	28	47
2	2009	11	27	38
3	2010	19	31	50
4	2011	15	24	39
5	2012	17	35	52
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>145</b>	<b>226</b>

*Sumber Data: PTUN Makassar, 2013*

Dari data di atas terlihat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari tahun 2008 – 2012 banyak yang membatalkan sertifikat, hal ini membuktikan pihak Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Sertifikat hak atas tanah cacat administrasi dalam penerbitan haknya, kesalahan prosedur, kesalahan penerapan

peraturan perundang-undangan, kesalahan data subjek hak/objek hak atau data fisik dan data yuridis tidak benar.

Seharusnya Badan Pertanahan Nasional reformasi birokrasi dan lebih Profesional lagi dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, agar masyarakat tidak dirugikan dan sengketa pertanahan bisa berkurang sehingga tidak menimbulkan konflik di Masyarakat.

**Tabel 3**  
**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar**  
**tentang Sertifikat Tanah dirinci menurut tahun 2008 – 2012**

No	Tahun	Diterima	Diputus		Total
			Dibatalkan	Dikukuhkan	
1	2008	51	20	31	51
2	2009	65	18	47	65
3	2010	80	21	59	80
4	2011	85	21	64	85
5	2012	86	18	68	86
<b>Total</b>		<b>367</b>	<b>98</b>	<b>269</b>	<b>367</b>

Tidak jauh beda dengan table 1 dan 2, table 3 di atas ini juga membuktikan pihak penggugat dan tergugat kebanyakan tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Dari tahun ketahun pembatalan sertifikat berdasarkan data diatas mengalami peningkatan, namun pelaksanaanya sering mengalami banyak hambatan. Menurut wawancara penulis oleh hakim sutiyono faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan sertifikat Hak atas Tanah oleh BPN :

1. Faktor kepatuhan Hukum dari Badan/ Pejabat Hukum
2. Faktor berubahnya keadaan (sosial, budaya, alam).
3. Faktor kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan

Lebih lanjut sutiyono mengatakan upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang memenangkan gugatan apabila pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan oleh tergugat dapat dilihat kembali pada pasal 116 Undang – undang No. 51 tahun 2009 atau dapat juga yang bersangkutan menggugat di Peradilan Umum dengan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Pasal 1365 BW.

Sedangkan menurut hakim Simbar Kristianto upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan gugatan apabila pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan:

1. Upaya Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yakni memberi sanksi untuk membayar sejumlah uang paksa atau sanksi administrasi.
2. Upaya Hukum pihak yang menang, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat dan menuntut ganti rugi.

Sedangkan menurut wawancara dengan pihak BPN yang diwakili oleh Nur Fajar, menurutnya Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan sertifikat Hak atas Tanah tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yakni:

1. Pihak yang memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Pro Aktif mengajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut.

Untuk lebih mendalami masalah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional,

ada satu kasus sengketa pertanahan yang masuk di PTUN Makassar yang dikemukakan uraian dan tanggapan penulis tentang putusan tersebut untuk dicermati dan dipahami yakni Putusan Nomor 31/G.TUN/2007/P.TUN.Mks sebagai berikut:

#### **A. DUDUK PERKARA**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 juni 2007 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2007, isinya menerapkan sebagai berikut;

**Mengenai objek gugat**, Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 juni 1984, seluas 20.573 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 163/ Barombong, Gambar situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20.534 m<sup>2</sup>, atas nama ANDI PANGURISANG;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 m<sup>2</sup>, atas nama TITIN HUSNI ;

Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) ;

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Almarhum Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg. Juma bin Kalo (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1991 dan dari perkawinannya dengan isterinya bernama Almarhum Time telah dikaruniai 6



(enam) orang anak, dan dari ke-6 anaknya tersebut satu diantaranya telah meninggal dunia. Sehingga yang hidup hingga saat ini adalah ;

- Bayang Dg. Ngaseng (Penggugat) ;
- Dg. Sore ;
- Hj. Calle ;
- Hj. Memang dan ;
- Dg. Nai ;

- 2) Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud almarhum Tjonga bin Kalo alias Djonga Dg. Kuma bin Kalo (orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah darat (kebun) seluas kurang lebih 3, 34 Ha (tiga koma tiga empat hektoare) yang letaknya di kampung Bayang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas ;

- Utara : Tanah milik H. Poto ;
- Timur : Tanah milik H. Badollahi ;
- Selatan : Jalanan ;
- Barat : Jalanan ;

Bahwa tanah tersebut pada tahun 1959 masuk dalam wilayah Kampung Barombong, Desa Limbung, Kabupaten Gowa. Dengan Persil Nomor 6 DII Kohir Nomor 975 CI. Sekarang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

- 3) Bahwa tanah tersebut digarap dan diolah sebagai sumber penghidupan orang tua Penggugat hingga akhir hayatnya. Bahkan diatas tanah itulah orang tua Penggugat bertempat tinggal. Diatas tanah itu pula anak-anak dari Tjonga bin

Kalo alias Tjonga Dg. Juma bin Kalo dilahirkan, bahkan diatas tanah itu anak-anak dari Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg. Juma bin Kalo menghidupi keluarganya dan bertempat tinggal hingga saat ini ;

- 4) Bahwa pada akhir bulan Maret 2007 tepatnya pada tanggal 26 Maret 2007 Penggugat dipanggil selaku Tersangka oleh Penyidik POLWILTABES Makassar, dan ketika Penggugat di periksa Penyidik menyampaikan kepada Penggugat “Bahwa saudara (Penggugat) dilapor oleh seorang yang bernama HUSNI MANGGABARANI dengan laporan bahwa saudara telah melakukan penyerobtan atas tanahnya”. Atas penyampaian penyidik tersebut Penggugat membantahnya dengan alasan tanah tersebut merupakan milik orang tuanya yang telah dikuasainya dan ditempatinya sejak dari dahulu hingga saat ini; Bahwa pada pemeriksaan berikutnya Penyidik menyampaikan kepada Penggugat “Bahwa tanah yang saudara tempati/ garap tersebut telah bersertifikat dengan menunjuk objek gugat sebagaimana yang dimaksud” ; Bahwa pada saat itulah Penggugat mengetahui keberadaan objek gugat tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut maka pengajuan gugatan ini belumlah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- 5) Bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas maka objek gugat sebagaimana dimaksud bila dipelajari dan diteliti secara seksama, secara hukum mengandung cacad yuridis oleh karena:

- Tanah in litis merupakan tanah milik orang tua Penggugat, tanah mana dari dahulu hingga saat ini dikuasai dan digarap serta ditempati baik oleh orang tua Penggugat ketika masih hidup hingga akhir hayatnya, hingga kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai sekarang ini:
  - Bila diteliti secara seksama penempatan objek gugat pada tanah in litis secara hukum tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, oleh karena disamping tanah yang diterbitkan dalam objek gugat tersebut tempatnya/ lokasinya bukan pada tempat/ lokasi tanah milik orang tua Penggugat, juga bila dilihat dari segi luasnya sangat berbeda, sebab pada objek gugat tersebut luas tanah yang diuraikan secara keseluruhan adalah 51.394M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau 5.13 Ha (lima koma tiga belas hektare), sementara tanah milik orang tua Penggugat yang dari dahulu hingga saat ini dikuasai dan digarap serta ditempati luasnya kurang lebih 3.34 Ha (tiga koma tiga puluh empat hektare) ;
- 6) Bahwa dari hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas jelas menunjukkan bahwa proses penerbitan objek gugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian, kecermatan dan ketelitian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) sub a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 7) Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat selaku salah seorang ahli waris dari almarhum Tjonga bin Kalo alias Tjonga Dg. Juma bin Kalo selaku pemilik atas tanah tersebut merasa dirugikan. Untuk itu cukup berdasar hukum bilamana Penggugat menuntut supaya objek gugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barumbung, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20. 573 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 163/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20. 534 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama ANDI PANGURISANG ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10. 287 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama TITI HUSNI ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, seluas 20. 573 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir. HUSNI MAGGABARANI ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 193/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1219 tanggal 25 Juni 1984 seluas 20. 534 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama ANDI PANGURISANG ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984 seluas 10. 287 M<sup>2</sup> (Sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama TITIN HUSNI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti dari Penggugat berupa surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 18 Maret 1959 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 berupa surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 5 Maret 1975. Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti Kepemilikan Penggugat berupa Rinci masih berlaku sebagai tanda bukti hak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah karena diterbitkan dibawah tahun 1960 sementara bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti wajib pajak.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas Penggugat menguasai tanah secara fisik dengan dibuktikan adanya beberapa bangunan rumah permanen dan rumah panggung diatas tanah sertifikat objek sengketa.

Menimbang, Bahwa dari Uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan terlebih dahulu penyelidikan riwayat tanah mengenai data fisik dan data yuridis tanah sertifikat objek sengketa atau dilakukan secara tidak cermat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat 2.

Menimbang, bahwa Tergugat selama di persidangan tidak mengajukan surat bukti berupa Penetapan batas-batas tanah dan pengumuman dari hasil penyelidikan riwayat tanah sehingga tidak memberikan kesempatan lagi orang-orang yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 4 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti sebagian sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Barombong, Gambar situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984 atas nama Ir. Husni Manggabarani dan Nomor 164/Borombong, Gambar situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984 atas nama Titin Husni harus dinyatakan batal dan harus dicabut Tergugat. Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **C. AMAR PUTUSAN**

#### **Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**

Majelis Hakim Yang Mengadili

Hakim Ketua : Kasim, S.H

Hakim Anggota : Amir Fauzi, S.H

Haryati, S.H

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.573 M<sup>2</sup>;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama TITIN HUSNI, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.573 M<sup>2</sup>;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama TITIN HUSNI, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Terguga II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.



**Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Upaya Hukum Banding)**

Majelis Hakim Yang Mengadili

Hakim Ketua : Ismail Baturante, S.H

Hakim Anggota : Hj. Elly Hadidjah, S.H

Jayatan Sihombing, S.H

Mengadili:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi I dan II/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/ G. TUN/ 2007/PTUN. Mks, tanggal 28 Januari 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 159.500,- (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

**Amar Putusan Mahkamah Agung (Upaya Hukum Kasasi)**

Majelis Hakim Yang Mengadili

Hakim Ketua : Marina Sidabutar, S.H., M.H

Hakim Anggota : Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. M.A.

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : BAYANG DG. NGASENG tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 37/ B. TUN/ 2008/ PT. TUN. Mks, tanggal 8 Juli 2008 ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.573 M<sup>2</sup> ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, tanggal 30 mei 1985, atas nama TITIN HUSNI, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M<sup>2</sup> ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI, Gambar Situasi Nomor 1220 tanggal 25 Juni 1984, luas 20.573 M<sup>2</sup> ;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama TITIN HUSNI, Gambar Situasi Nomor 1221 tanggal 25 Juni 1984, seluas 10.287 M<sup>2</sup>;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Amar Putusan Mahkamah Agung (Upaya Hukum Peninjauan Kembali)**

Majelis Hakim Yang Mengadili

Hakim Ketua : Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Hakim Anggota : Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum

H. Yulius, S.H., M.H.

Mengadili:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I : Ir. HUSNI MANGGABARANI dan TITIN SUGIHAT, Pemohon Peninjauan Kembali II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### **D. Tanggapan Penulis**

Menurut penulis, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menetapkan putusan dalam perkara tersebut sudah tepat. Penulis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam merbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. Ketidakcermatan BPN dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat pada saat Tergugat tidak melakukan terlebih dahulu penyelidikan riwayat tanah mengenai data fisik dan data yuridis tanah sertifikat objek sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

Perturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 3 ayat 2. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan objek sengketa berupa sertifikat hak milik karena cacat administrasi dalam penerbitannya.

Namun di tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara malah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi I dan II/ Pembanding, dengan dasar bahwa terdapat perbedaan persial, nomor kohir dan perbedaan luas dari ke 3 sertifikat obyek sengketa. Sehingga menurut Majelis Hakim banding sengketa tersebut pada hakekatnya adalah sengketa perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memutuskan. Menurut penulis, keputusan tersebut tidak tepat alasanya karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik, yang menurut hukum merupakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya.

Namun upaya hukum kasasi yang dilakukan Pihak penggugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membuhkan hasil. Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 37/ B. TUN/ 2008/ PT. TUN dengan alasan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum. Begitupula Upaya Peninjauan Kembali yang amar putusannya tetap mengabulkan gugatan

Penggugat dan membatalkan objek sengketa. Menurut penulis putusan tersebut sudah tepat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut sudah berarti sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, dengan kata lain putusan tersebut sudah ingkrah.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus diatas, Penggugat memenangkan gugatan dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat eksekusi. Hal ini bertartit kepala BPN sebagai pejabat Tata Usaha Negara diperintahkan mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 162/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama Ir. HUSNI MANGGABARANI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 164/ Barombong, tanggal 30 Mei 1985, atas nama TITIN HUSNI.

Namun eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut belum dijalankan oleh kepala BPN sebagai pejabat Tata Usaha Negara, padahal putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Menurut wawancara dengan Nur Fajar Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan di BPN kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Belum dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut oleh BPN dikarenakan tidak adanya sikap yang pro aktif dari pihak pemenang untuk mengajukan permohonan permintaan pelaksanaan putusan sesegera mungkin kepada pihak tergugat dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional, hal ini kemungkinan terjadi karena banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut”

Jadi berdasarkan contoh kasus diatas faktor penghambat sehingga pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 31/G.TUN/2007/P.TUN.Mks oleh BPN belum bisa dilaksanakan disebabkan karena pihak yang memenagkan gugatan dalam hal ini penggugat tidak pro aktif dalam mengajukan permohonan pembatalan, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Mekanisme Pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah:
  - 1) Pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, hal ini sesuai dengan pasal 126 Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
  - 2) Setelah permohonan diajukan dan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas, data yuridis dan data fisik pemohon berdasarkan pasal 60 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 .
  - 3) Setelah permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah diperiksa, diteliti dan jika sudah dianggap lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi. Selanjutnya berkas permohonan diperiksa dan apabila semua syarat terpenuhi maka disampaikan kepada penggugat bahwa surat keputusan atau sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa telah dicabut. Dengan demikian, maka pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara

yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.

2. Faktor-faktor yang menghambat Badan Pertanahan Nasional Makassar dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah:

1. Faktor kepatuhan Hukum dari Badan/ Pejabat Hukum
2. Faktor berubahnya keadaan (sosial, budaya, alam).
3. Faktor kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan
4. Pihak yang memenagkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Pro Aktif megajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Kepada Pejabat Tata Usaha Negara.
5. Banyaknya ketentuan atau kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh pemohon, sehingga tidak dimungkinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan putusan tersebut.

#### ***B. Saran***

1. Untuk efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara, maka diperlukan ketegasan dari ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untul mendesak pelaksanaan putusan kepada pihak yang dibebani kewajiban, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan Pertanhan Nasional Propinsi sebaiknya lebih memperhatikan dan melaksakan secara konsisten asas-asas pemerintahan yang layak dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, termasuk dalam menjalankan kewajiban dalam melaksanakan putusan pengadilan.



2. Ketua Pengadilan pun harus selalu konsisten dan pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal (119) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta pihak penggugat ataupun pihak yang memenangkan perkara ini sebaiknya sejak awal pro aktif dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraef. *Al Qura'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Karya Unipress, 1970.
- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa, 1992.
- Achmad Chomzah, Ali. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al Quranul Karim Kepunyaan Raja Fahd, Saudi Arabia, 1415 H.
- Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*.Cet. 3; Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2001.
- Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Peraturan Bidang Pendaftaran Tanah*. Jakarta, 2004.
- Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Indraharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Institute, Zevan. "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Zevan Institute Blog*. <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com/2011/01/putusan-ptun.html> (16 Januari 2013).
- Lubis, Mhd. Yamin dan Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Marwan, M dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Philipus, M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sipayung, JJ Paulus. *Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam PTUN*. Jakarta: Departemen dalam Negeri.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Jogjakarta: Liberty, 2000.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendafrannya*. Cet. 4; Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Sri, Rita Esti. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada era otonomi Daerah (perspektif politik hukum pertanahan)." *Jurnal Ekonomi Bisbis dan Perbankan*. Phhttp://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/view/88/70 (11 Januari 2013)

- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa sukses (Penebar Swadaya Group), 2012
- Tjandra, W. Riawan. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Jogjakarta: Cahaya Atma Pusaka. 2011
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Soraya Dwi Esfandiari**, lahir di Makassar tanggal 20 Juli 1991 merupakan anak ke dua dari dua bersaudara oleh pasangan H. Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si bersama dengan Hj. Hasmah Julia, SE. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SD. Negeri Gunung Sari 1 Makassar pada Tahun 1998 - 2003 kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/ MTS) pada Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros pada tahun 2003 - 2006, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada SMA HAMRAWATI Makassar pada tahun 2006 - 2009, hingga pada tahun 2009 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada beberapa organisasi ekstra dan intra yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum periode 2010 - 2011, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC. Makassar, dan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar.